

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Rusia dengan segala macam politik luar negerinya telah membawa dinamika sejarah yang cukup bergejolak hingga terbentuknya negara yang secara geografis berada di Eurasia ini. Dilihat dari kacamata sejarah, pada dasarnya Rusia merupakan suatu entitas yang berdaulat dengan sistem kekaisaran Rusia yang dibentuk pada tahun 22 Oktober 1721. Sejak masa kekaisaran, Rusia telah menguasai wilayah daratan yang sangat luas seperti sekarang dan pada masa pemerintahan Yakaterina II Rusia menempati posisi yang kuat dan penting pada abad ke-18 dan ke-19. Namun, Kekaisaran Rusia mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Nicholas II dan diperburuk dengan kekalahan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang (1904-1905).

Sebelumnya, kritik dan penolakan terhadap pemerintahan sudah ada oleh kaum tani dan kaum intelektual yang kemudian menjadi pihak oposisi. Kekalahan perang ini kemudian dijadikan kesempatan untuk menurunkan prestise rezim di mata rakyat yang kemudian pecah menjadi demonstrasi di berbagai daerah. Ketegangan terus merebak hingga Nicholas II mengundurkan diri pada 1917. Tak hanya itu Berbagai macam kegagalan pada Perang Dunia I juga memunculkan permasalahan-permasalahan baru seperti wabah kelaparan dan keruntuhan ekonomi. Keadaan ini menandakan runtuhnya kekaisaran Rusia dan pemerintahan kemudian diambil alih oleh kaum Bolshevik (McCauler 2002).

Pada masa pemerintahan Bolshevik berbagai revolusi dilakukan hingga akhirnya pada tahun 1922 Moskwa memproklamasikan berdirinya Uni Republik Sosialis Soviet yang terdiri dari Rusia, Belarusia, Ukraina, dan negara Federasi Transkaukasia. Uni Soviet terus mengalami perkembangan dan kemajuan hingga menjadi negara dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas dengan gabungan 15 negara. Perekonomian Uni Soviet juga berkembang pesat selama tahun 1950-60an hingga kemudian pasca Perang Dunia II Uni Soviet terlibat Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Perang ini pada dasarnya merupakan perlombaan antara ideologi Komunisme dan Liberalisme.

Kedua negara bersaing dalam politik, ekonomi, teknologi dan propaganda. Banyak dampak yang ditimbulkan dari perang dingin termasuk kemunduran ekonomi Uni Soviet. Reformasi coba dilakukan pada pemerintahan Mikhail Gorbachev melalui kebijakan perestroika untuk memperbaiki perekonomian. Namun, hal yang terjadi justru berkebalikan akibat pertentangan yang menjangkit di berbagai kelompok. Pada tahun 1990 kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet karena mereka menganggap sistem komunisme tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang kemudian pada tahun 1991 negara-negara bagian mulai melepaskan diri. Uni Soviet resmi bubar pada 25 Desember 1991 dan ditandai dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet (Kompas 2021).

Pasca runtuhnya Uni Soviet setelah berakhirnya perang dingin, Rusia bersikap proaktif dengan mulai membentuk beberapa organisasi Kerjasama kolektif regional Bersama negara bekas pecahan Uni Soviet. Salah satunya adalah *Commonwealth Independent States* (CIS) yang mendorong negara anggota untuk bekerjasama baik

dalam bidang ekonomi, militer, perdagangan, keuangan, dan lain-lain. Rusia pada Post-Soviet juga membentuk beberapa organisasi lainnya seperti Collective Security Treaty Organization (CSTO) yang berfokus di bidang militer dan juga Eurasian Economic Union (EEU) yang berfokus di bidang ekonomi. Rusia sangat aktif dalam mempromosikan organisasi ini di bawah pengaruhnya sebagai negara dengan kekuatan yang cukup kuat di Kawasan.

Tidak hanya membentuk organisasi kolektif regional, Rusia juga turut aktif mengambil peran di dalam berbagai konflik yang terjadi baik di belahan benua lain dan juga terkhusus di Kawasan. Salah satunya adalah di konflik Nagorno Karabakh, persengketaan wilayah antara Armenia dan Azerbaijan. Kedua negara ini merupakan negara pecahan Uni Soviet yang terletak di wilayah Kaukasus Selatan dan merupakan objek utama atas terjadinya perseteruan yang telah mengakar sejak lama bahkan pada masa Kekaisaran Rusia. Hal ini didasarkan atas etnis Armenia yang sudah lama menduduki wilayah Nagorno Karabakh terhitung sejak tiga ribu tahun yang lalu. Namun, secara internasional wilayah ini diakui sebagai bagian dari Republik Azerbaijan yang kemudian semakin memperkeruh ketegangan di antara kedua negara. Penggunaan segala bentuk kekerasan dan senjata selalu dilancarkan oleh kedua belah pihak di sepanjang jalur kontak konflik. Hingga kini, konflik ini termasuk konflik pasca-Soviet yang paling berdarah dan paling sulit untuk diselesaikan.

Pada masa perang Dunia I, Keluarnya Kekaisaran ottoman memunculkan peluang bagi etnis Armenia untuk mendapatkan kembali kendali atas Nagorno Karabakh. Pada awalnya Inggris ingin mengisi kekosongan yang ditinggali oleh Turki dan mencoba meyakinkan masyarakat Armenia di Nagorno

Karabakh untuk mengakui klaim teritorial oleh Azerbaijan. Bersamaan dengan upaya tersebut, pasukan Azerbaijan mulai melancarkan serangan baru di Nagorno Karabakh dalam rangka untuk pembersihan etnis yang kemudian menyebabkan kekalahan etnis Armenia. Kekalahan ini membuat orang-orang Armenia di Nagorno Karabakh mengakui otoritas Azerbaijan dengan beberapa prasayarat dan reservasi.

Namun, pada tahun 1920 Armenia melancarkan serangan balasan yang berakhir tragis bagi komunitas lokal ketika pasukan Azerbaijan menangkis serangan itu dan merespons dengan menghancurkan sektor Armenia di Shusha, ibu kota Nagorno-Karabakh. Antara beberapa ratus dan beberapa ribu orang Armenia tewas dalam kerusuhan etnis berikutnya (matamatapolitik 2020). Konflik yang berkepanjangan ini akhirnya bisa diredam ketika Boshhevik mengambil alih kekuasaan di Armenia dan Azerbaijan. Pada masa ini Armenia dan Nagorno Karabakh menginginkan wilayah mereka disatukan dengan Armenia namun keputusan menyatakan bahwa mereka diberi status Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast (NKAO) dan menjadi bagian dari eRpublik Sosialis Soviet Azerbaijan.

Keputusan tersebut dapat dikatakan menjadi awal mula baru penyebab ketegangan diantara kedua belah pihak. Pasalnya, Armenia masih menuntut kemerdekaan atas Nagorno Karabakh sedangkan Azerbaijan masih mengakui Nagorno Karabakh sebagai bagian dari teritorinya. Pada 14 Februari 1988, banyak pengunjuk rasa di daerah pusat otonomi Nagorno Karabakh, menuntut untuk reunifikasi dari NKAO. Tuntutan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Soviet dan kemudian meloloskan resolusi untuk disatukannya NKAO dengan Armenia. Pada 26 Februari 1988 ratusan orang berkumpul di Yerevan untuk mendukung

tuntutan ini. Namun, kenyataan yang terjadi pada 27 hingga 29 Februari 1988 penduduk Armenia dipaksa keluarga dari kota Sumgait dengan menggunakan kekerasan tanpa penjelasan yang jelas. Kemudian pada 18 Juli 1988 Presidium Soviet tertinggi menyatakan bahwa Nagorno Karabakh tetap menjadi bagian dari Azerbaijan.

Jika ditinjau dengan alur mundur, Uni Soviet sangat memiliki peran yang cukup besar dalam pergejolakan konflik ini, salah satunya pada tahun 1945 dimana petisi Armenia ditinjau oleh Kremlin. Kremlin meminta pendapat ke Azerbaijan dan mereka menyetujui petisi pemisahan Nagorno Karabakh namun dengan pengecualian untuk Kota Shusha, pusat budaya Azerbaijan dengan mayoritas Azerbaijan. Namun, sebagai gantinya ia meminta tiga wilayah administratif Armenia (Azizbekov, Vedi, dan Qarabaglar) untuk bergabung dengan Azerbaijan berdasarkan mayoritas penduduk Azerbaijan (Askerov 2020). Usulan tersebut kemudian ditolak oleh Armenia dan kemudian Armenia mengembangkan dan mengeksekusi kebijakan deportasi bertahap orang Azerbaijan di Armenia. Bahkan, pasca runtuhnya Uni Soviet konflik ini masih belum bisa terselesaikan hingga detik ini.

Sejak dilakukannya pembicaraan damai pada tahun 1992 melalui OSCE dan dilakukannya gencatan senjata pada tahun 1994, konflik kembali meletus pada tahun 2016 yang kemudian juga dikenal dengan Perang April atau Perang Empat Hari. Penggunaan segala alat peperangan dilancarkan oleh kedua belah pihak. Konflik dapat diredam melalui pertemuan yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata di Moskow pada 5 April. Melihat respon Internasional, tak hanya Rusia pada eskalasi ini Turki sudah mengumumkan dukungan kuatnya terhadap Azerbaijan (Jarosiewicz

dan Falkowski 2016). Dukungan terus berlanjut hingga perang kembali pecah pada September tahun 2020 atau juga disebut perang enam minggu.

Ekskalasi enam minggu ini tercatat sebagai perpecahan yang paling parah sejak terakhir konflik besar-besaran pada tahun 1990-an. Serangan dimulai pada 27 September 2020 dan terus dilancarkan oleh kedua belah pihak. Pada ekskalasi ini Rusia mengerahkan pasukan penjaga perdamaian. Akan tetapi, anehnya Rusia tidak menahan serangan Azerbaijan sebagai aliansi yang harus melindungi Armenia mengingat mereka tergabung ke dalam CSTO. Serangan yang dimulai tampaknya juga bukan serangan yang tidak direncanakan karena Azerbaijan yang tampil dengan persiapan yang cukup lengkap (Minzarari 2020). Turki juga ikut serta dalam membantu Azerbaijan ditandai dengan kedatangan jenderal tentara Turki, Jendral Kolonel Sharaf Ongay yang mengadakan latihan bersama pasukan Azerbaijan dan Turki (News 2020).

Setelah berlangsung selama enam bulan, kesepakatan gencatan senjata akhirnya dapat dicapai melalui pembicaraan yang ditengahi oleh Rusia. Dibawah kesepakatan ini, Azerbaijan akan mempertahankan wilayah Nagorno karabakh yang telah diambil selama konflik sebelumnya. Armenia juga telah setuju untuk menarik diri dari beberapa daerah lain yang berdekatan dalam jangka waktu beberapa minggu kedepan. Rusia juga mengumumkan bahwa pasukan perdamaian Rusia akan dikerahkan untuk berpatroli di garis depan (BBC, Armenia, Azerbaijan, and Russia Sugn Nagorno-Karabakh Peace deal 2020).

Berbeda dengan Uni Soviet, Rusia tidak menunjukkan sikap yang konstan memihak kepada siapa. Rusia menunjukkan sikap netralnya namun tetap membantu kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan

Rusia membantu Armenia, , membantu Azerbaijan, dan juga menengahi keduanya. Pada tahun 1993, seluruh wilayah Nagorno karabakh dan tujuh distrik administratif Azerbaijan jatuh ke tangan Armenia dengan bantuan aktif dari militer Rusia. Kemudian Rusia tergabung dan menjadi pemimpin dalam salah satu agenda yang bertujuan untuk memediasi konflik antara Armenia dan Azerbaijan, yakni OSCE Minsk Group (Broers 2020).

Kedekatan Rusia kepada Armenia lebih dekat dikarenakan Rusia dan Armenia tergabung dalam Collective Security Treaty Organization (CSTO), sebuah organisasi Kerjasama dalam bidang militer. Secara historis, pasca runtuhnya Soviet, Rusia tetap berupaya untuk menyatukan negara-negara pecahannya yang kemudian tergabung ke dalam Commonwealth Independent State (CIS), Armenia dan Azerbaijan juga tergabung ke dalamnya. Akan tetapi, walaupun tergabung ke dalam organisasi dengan tujuan yang sama, Rusia aktif dalam memasok senjata kepada dua belah pihak drone berteknologi tinggi. Berdasarkan laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) memperkirakan bahwa selama dekade 2011–20 Rusia adalah pengeksport senjata utama terbesar ke Armenia dan Azerbaijan (Wazeman, Kuimova dan Smith 2021).

Terdapat kontradiksi antara keinginan Rusia untuk bersikap netral sebagaimana ia harusnya berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam konflik ini dengan berbagai tindakan yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan di atas pada tiap eskalasi, Rusia selalu mengambil peran baik sebagai penjaga perdamaian, mediator, bahkan juga ikut serta membantu pasukan atau memasok senjata. Hal ini tentu menimbulkan sikap dan kesan dilematis akan posisi Rusia di Kaukasus Selatan, khususnya dalam konflik Nagorno Karabakh.

Keterlibatan pihak lain seperti Turki bisa jadi dianggap menjadi ancaman jika berkaca dari ambisi Pasca-Soviet untuk menyatukan dan mempertahankan pengaruhnya di negara bekas pecahan Uni Soviet. Hubungan dengan Armenia dan Azerbaijan harus tetap stabil dan diimbangkan oleh Rusia.

Menurut kerangka analisis geopolitik yang diajukan pada tahun 1997 oleh mendiang Zbigniew Brzezinski, Kaukasus berada di dalam inti dari apa yang disebut “Balkan Eurasia”, wilayah yang sangat bergejolak karena alasan berikut: 1) deposit alamnya yang besar. sumber daya, termasuk energi dan mineral; 2) perpaduan heterogen dari orang-orang yang persaingan antaretnisnya yang sengit telah berlangsung selama berabad-abad; 3) maraknya perbatasan sewenang-wenang yang sering diperebutkan; dan 4) posisi strategis penting dalam hal pengaruh geopolitik dan arus perdagangan internasional menarik kepentingan kekuatan lokal dan ekstra-regional (Alonso 2020). Penulis melihat ada asumsi dasar yang menarik untuk diteliti lebih lanjut antara analisa geopolitik dan sejarah dengan apa yang dilakukan oleh Rusia dalam konflik yang tak kunjung padam ini serta ambisi yang masih berapi-api terhadap ancaman yang muncul baik dari dalam pihak yang terlibat atau pihak luar yang juga tak kalah ikut serta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian tulisan ini adalah **“Mengapa Rusia tidak menjalankan perannya sebagai OSCE Minsk Group dalam konflik Nagorno Karabakh?”**.

C. Kerangka Teori

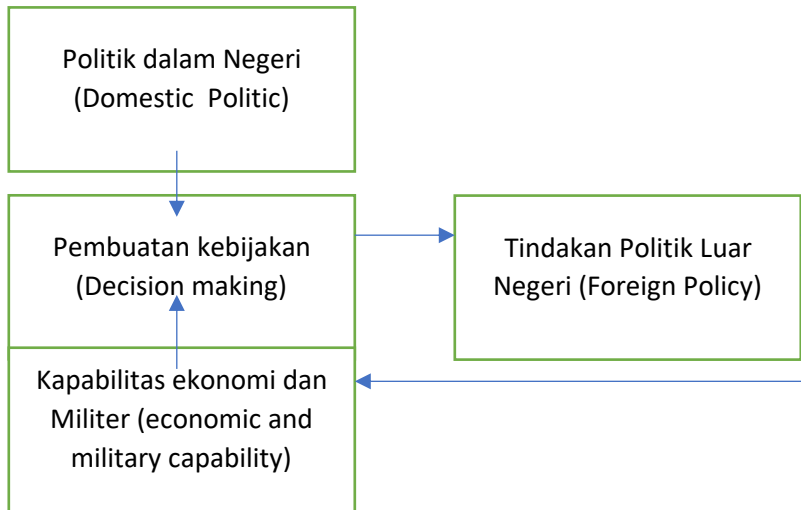
Dalam dunia akademik baik sosial maupun ilmiah, terdapat banyak teori yang dibuat melalui gagasan-gagasan berdasarkan objek yang di observasi. Teori dibentuk guna membantu para akademisi dan peneliti untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan paradigma. Hal yang sama juga diaplikasikan dalam dunia hubungan internasional, seperti menjadi sebuah upaya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam hubungan antar negara. Dalam penelitian ini juga akan digunakan teori sebagai kacamata dalam menjelaskan kepentingan Rusia di konflik Nagorno Karabakh. Teori yang akan digunakan adalah teori pengambilan keputusan luar negeri.

1. Teori pengambilan keputusan luar negeri

Teori pengambilan keputusan luar negeri merupakan sebuah teori yang dapat dijadikan kacamata untuk menjelaskan alasan sebuah negara dalam mengeluarkan kebijakan. Salah satu tokoh yang mengembangkan studi dari teori ini adalah William D. Coplin. Coplin melalui tulisannya menjabarkan teori pengambilan keputusan Luar Negeri yaitu (Coplin 1992):

“apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri:





Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional, CV Sinar Baru, Bandung, 1987, hal 30

- a. Kondisi politik dalam negeri. Determinan ini meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang bersangkutan, yang mempengaruhi keputusan tersebut, termasuk faktor budaya
- b. Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk juga faktor geografis yang menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan
- c. Konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Fokus penelitian pada tulisan ini hanya akan berfokus pada dua determinan, yakni situasi ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Kedua konteks ini dapat menjelaskan apa saja kepentingan Rusia dilihat dari konsiderasi negaranya dalam mengeluarkan kebijakan, salah satunya bersikap netral dan tetap membantu kedua belah pihak.

a. Kondisi domestik

Kondisi domestik berbicara tentang pihak-pihak ataupun aktor yang ada di dalam lingkup domestic suatu negara yang mempengaruhi suatu kebijakan diputuskan dan diterapkan. Pada kasus ini, perlu kita perhatikan bahwa Rusia merupakan negara tetangga yang hanya dipisahkan oleh batas territorial daratan dengan Armenia, dan pada masa pemerintahan Soviet, Armenia merupakan bagian dari Uni Soviet. Bekas unifikasi dan letak geografis ini menyebabkan banyaknya diaspora Armenia di Rusia, Diaspora ini bahkan merupakan diaspora terbesar yang ada di Rusia. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan keterkaitan antara kebijakan Rusia dengan eksistensi etnis Armenia di Rusia serta kontribusi dan loyalitas yang telah mereka berikan kepada Rusia.

b. Situasi ekonomi dan militer Rusia

Dalam mengambil keputusan luar negeri harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer yang dikalkulasikan untuk mengukur kemampuan secara rasionali guna menghindari kerusakan serta resiko yang terjadi. Ekonomi dapat diukur melalui beberapa variabel seperti GNP, GNP perkapita, neraca pembayaran suatu negara. Sedangkan untuk militer dapat diukur melalui komponen militer secara materialistik maupun level ketergantungan kepada negara lain dan kestabilan internal.

Dilihat dari sisi ekonomi, Armenia dan Azerbaijan merupakan mitra perdagangan Rusia. pada tahun 2008, Rusia adalah mitra dagang terbesar Armenia, mengambil 19,7 persen ekspor terakhir dan mengirim 19,1 persen impor negara itu ke Armenia (Bhisku 2011). Armenia dan Rusia juga tergabung dalam Eurasian Economic Union (EEU) yang merupakan sebuah asosiasi berfokus pada kerjasama perdagangan dan perekonomian. A

Sedangkan dari sisi militer, Selama perang berlangsung, Rusia menjadi pemasok senjata ke dua belah pihak sekaligus. Pada 2007-2011, Moskow menyediakan 55% impor senjata Azerbaijan dan 96%. Rusia dan Armenia merupakan sekutu kuat yang tergabung dalam aliansi yang sama, yakni Collective Security Treaty Organization (CSTO). CSTO, yang didirikan pada 2002, adalah penerus upaya pada 1990-an untuk membentuk aliansi militer antar pemerintah dan organisasi keamanan kolektif yang dipimpin Rusia dari CIS .

CSTO memberikan kerangka hukum untuk operasi penjaga perdamaian dan manajemen perbatasan. Melalui ini pula Rusia mempertahankan sewa jangka panjang di pangkalan militer di Kyrgyzstan dan Armenia (mempertahankan fasilitas di Tajikistan secara bilateral) dan berencana untuk membangun sistem pertahanan udara bersama dan pengaturan pemantauan kedirgantaraan dengan anggotanya, pada perjanjian bulan Agustus 2010 umur pangkalan militer Rusia di Gyumri, Armenia Utara, diperpanjang hingga tahun 2044 (caucasusedition 2013)

CSTO Juga melarang masing-masing negara dari mengizinkan aktor militer asing lainnya hak untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah mereka, yang secara efektif memberikan hak veto kepada Rusia atas akses pangkalan di seluruh wilayah. Anggota juga menerima hak untuk mendapatkan perangkat keras militer dari Rusia dengan harga diskon. CSTO melakukan latihan tahunan dan memfasilitasi pertukaran personel di antara negara-negara anggota.

Berdasarkan penjelasan terkait hubungan ekonomi dan militer Rusia dengan Armenia dan Azerbaijan, dapat kita teliti lebih dalam lagi kepentingan Rusia dari segi ekonomi dan juga militer.

c. Konteks Internasional

Konteks internasional dapat diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri yang berasal dari dunia internasional. Pada kacamata Rusia, determinan konteks internasional terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di negara pecahan Uni Soviet atau bisa dikategorikan sebagai Post-Soviet dan meluasnya pengaruh Turki serta NATO di Kaukasus Selatan

Pengaruh ini diupayakan sudah sejak lama pasca runtuhnya Soviet. Rusia membentuk sebuah asosiasi agi negra bekas Uni Soviet yang tergabung dalam Commonwealth of Independent States (CIS) pada 8 Desember 1991. Armenia dan Azerbaijan bergabung pada tahun 1993 dan 1994 beserta 9 negara lainnya. Beberapa ahli berasumsi bahwa pembentukan CIS ini merupakan upaya Rusia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di negara pecahan Uni Soviet, begitu juga di Kaukasus Selatan.

Banyak pengamat Barat beranggapan, bahwa presiden Rusia berusaha membangun kembali Uni Soviet dengan Rusia sebagai pusatnya mengaburkan berbagai instrumen, aktor, dan norma yang melaluinya Moskow benar-benar memberikan pengaruhnya di wilayah tersebut dan berpotensi di luarnya, Moskow memiliki banyak alat yang dapat digunakan untuk memengaruhi lintasan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan luar negeri tetangganya, bahkan jika ia tidak akan dapat membangun kembali negara kekaisaran (Cooley 2017).

Tak hanya Rusia, Turki juga mengambil peran dalam konflik Karabakh yang beraliansi dengan Azerbaijan. Turki sebagai aktor regional dengan aspirasi untuk menjadi pusat energi memiliki dampak yang menguntungkan di seluruh wilayah, berfungsi sebagai jembatan ke Barat melalui lokasinya yang unik.

Didukung oleh AS dan UE, Turki berusaha memperkuat pengaruh politik dan ekonominya di Kaukasus Selatan. “Sejak 1993 dan Persetujuan Ankara, Turki telah melihatnya sebagai prioritas nasional bahwa pipa ekspor utama dibangun dari Baku ke pelabuhan minyak air biru Turki di Mediterania di Ceyhan (pashayeva 2009).

Sebelumnya, Turki dan Rusia sudah terlibat langsung bersamaan dengan Turki di beberapa konflik, seperti konflik Libya dan Suriah. Namun ada beberapa ketegangan yang melibatkan keduanya sehingga menjadikan kedua negara terlibat dalam perang proxy. Dapat diasumsikan Rusia memiliki instrumen untuk menyelesaikan masalah, namun hingga kini masih belum terlihat tindakan yang condong ke arah situ. pangkalan militer Rusia di Armenia pada dasarnya tetap di sana untuk mengekang potensi ancaman militer yang berasal dari Turki daripada Azerbaijan, karena yang pertama pada titik tertentu dianggap ikut campur dalam perang Karabakh.

Selanjutnya, kenangan masa lalu antara Uni Soviet dan Pakta Warsawa dengan Amerika dan NATO masih menyisahkan rasa ancaman bagi Rusia karena eksistensi NATO yang masih bertahan hingga sekarang. hal ini diperburuk dengan kedekatan NATO dengan Azerbaijan yang lagi dan lagi menjadi ancaman bagi ambisi Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di Kaukasus Selatan. Kedekatan dan campur tangan Turki dan NATO ini kemudian dapat diklasifikasikan menjadi ancaman bagi Rusia dan menjadi pemicu sikap dilema Rusia.

D. Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

Pada tulisan ini, Unit Eksplanasi atau Variable Independent nya merupakan sebuah negara dan Unit Analisisnya atau Independent Variablenya

juga merupakan negara. Berdasarkan klasifikasi ini tipe penelitian kemudian merupakan korelasional yaitu tingkat negara-bangsa.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode eksplanatif kualitatif, yaitu metode dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *library research* dan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang didapatkan melalui perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian data yang didapatkan telah diolah dan diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa serta simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

c. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data eksplanatif induktif dimana penulis akan berusaha terlebih dahulu untuk memahami fakta yang berkaitan dengan objek Analisa. Fakta ini kemudian diubah menjadi generalisasi empiris dan akan dilakukan perumusan masalah, preposisi, dan dituangkan ke naskah tulisan yang baik dan mudah dimenegerti.

d. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang sudah dijelaskan diatas, penulis mengajukan hipotesa penelitian ini bahwa alasan Rusia tidak menjalankan perannya sebagai OSCE minsk group dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah:

1. Diaspora Armenia berpengaruh di Rusia
2. Mempertahankan hubungan ekonomi dan militernya di Kaukasus Selatan

3. Membendung meluasnya pengaruh Turki dan NATO di Kaukasus Selatan dan mencegah terjadinya revolusi sosial

e. Jangkauan Penelitian

Agar tidak memiliki pembahasan yang melebar atau menyimpang dari judul dan terfokus pada inti permasalahan sehingga penelitian dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Penulis menetapkan batasan tulisan hanya pada kepentingan Rusia dalam konflik Nagorno Karabakh dalam rentang waktu 2016-2020.